

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH TAHUN 2011

No.	Nomor Perda	Judul Perda	Peraturan Pelaksanaan			Jangka Waktu Penetapan	Keterangan
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
1.	1 Tahun 2011	Retribusi Jasa Umum	11 (2)	1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atau Dokumen Lain yang Dipersamakan	Peraturan Gubernur	3 Bulan	
			12 (2)	2. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran	Peraturan Gubernur		
			16 (3)	3. Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang	Diatur dan Ditetapkan Oleh Gubernur		
			18 (2)	4. Tarif Retribusi Pelayanan Peserta Askes, Jamkesmas, Jamsostek dan Badan Penjamin Kesehatan Lainnya	Peraturan Gubernur		

			22 (3)	5. Penetapan Tarif Retribusi Hasil Peninjauan Tarif	Peraturan Gubernur		
			24 (2)	6. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluarsa	Keputusan Gubernur		
			25 (2)	7. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi	Peraturan Gubernur		
			27 (2)	8. Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Operasional	Peraturan Gubernur		
			31 (7)	9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Peraturan Gubernur		
			32 (3)	10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi	Peraturan Gubernur		

			34 (3)	11. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif	Peraturan Gubernur		
No.	Nomor Perda	Judul Perda	Peraturan Pelaksanaan			Jangka Waktu Penetapan	Keterangan
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
2.	2 Tahun 2011	Retribusi Jasa Usaha	7 (3)	1. Tata Cara Pemakaian Benih Atau Bibit Untuk Keperluan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur	3 Bulan	Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan
			12 (2)	2. Tata Cara Pemungutan Retribusi Atau Dokumen Lain yang Dipersamakan	Peraturan Gubernur		
			13 (2)	3. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran	Peraturan Gubernur		
			15 (3)	4. Tata Cara Pemakaian Penggunaan/Pemanfaatan Objek Retribusi Jasa Usaha Dengan Naskah Perjanjian	Peraturan Gubernur		
			17 (3)	5. Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang	Diatur dan Ditetapkan Oleh Gubernur		
			22		Peraturan		2. - Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek

			(3)	6. Peninjauan dan Penyesuaian Tarif Retribusi	Gubernur		
			24		Peraturan Gubernur		
			(2)	7. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluarsa	Gubernur		
			25		Peraturan Gubernur		
			(2)	8. Tata Cara Pemberian Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi	Gubernur		
			27		Peraturan Gubernur		
			(2)	9. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Operasional	Gubernur		
			31		Peraturan Gubernur		
			(7)	10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Gubernur		
			32		Peraturan Gubernur		
			(3)	11. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi	Gubernur		
			34		Ditetapkan Oleh Gubernur		
			(4)	12. Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif	Gubernur		
							- Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
3.	3 Tahun 2011	Retribusi Perizinan Tertentu	12 (2)	1. Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis Untuk Memperoleh Izin Trayek dan Izin Operasi	Peraturan Gubernur	3 Bulan	2. - Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2011 - Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 (Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan
			17 (2)	2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atau Dokumen Lain yang Dipersamakan	Peraturan Gubernur		
			18 (2)	3. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran	Peraturan Gubernur		
			21 (3)	4. Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang	Peraturan Gubernur		
			24 (3)	5. Peninjauan dan Penyesuaian Struktur dan Tarif Retribusi	Peraturan Gubernur		
			26 (2)	6. Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluarsa	Keputusan Gubernur		

			27 (2)	7. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi	Peraturan Gubernur		Bermotor)
			31 (7)	8. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Peraturan Gubernur		- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 (Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya)
			32 (3)	9. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi	Peraturan Gubernur		
			33 (4)	10. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif	Peraturan Gubernur		
NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
4.	4 Tahun 2011	Pajak Daerah	6 (9)	1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur	3 Bulan	
			6 (10)	2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Tabel Yang Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri	Peraturan Gubernur		

			10 (4)	Dengan Pertimbangan Menteri Keuangan (Peraturan Gubernur 3. Tata cara pelaksanaan restitusi Pajak Kendaraan Bermotor	Ditetapkan oleh Gubernur		
			25 (3)	4. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan	Peraturan Gubernur		
			32 (2)	5. Tata Cara Penerbitan SKPD Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan	Peraturan Gubernur		
NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
			36 (2)	6. Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak	Peraturan Gubernur		
			41 (8)	7. Cara lain penyampaian Surat Paksa	Keputusan Gubernur		
			50 (2)	8. Penghapusan Piutang Pajak Provinsi Yang Sudah	Keputusan Gubernur		

				Kedaluwarsa		
			50 (3)	9. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa.	Peraturan Gubernur	
			60 (3)	10. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak	Peraturan Gubernur	
			64	11. Norma Pemeriksaan, Pedoman Laporan Pemeriksaan, dan Tata Cara Pemeriksaan Untuk Setiap Jenis Pajak	Ditetapkan Lebih Lanjut Oleh Gubernur	
			65 (2)	12. Tata Cara Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan	Peraturan Gubernur	
			67 (4)	13. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak	Peraturan Gubernur	
			71	14. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak	Peraturan Gubernur	

NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
			72	15. Bentuk dan Isi NPWPD, SKPD, SKPDLB, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan STPD,SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis, Surat Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Untuk Melaksanakan Penyitaan dan Surat Permohonan Pelelangan	Peraturan Gubernur		11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011
			73 (2)	16. Tata Cara Pemberian Bagi Hasil Dengan Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur		12. - Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 - Peraturan

			75 (3)	17. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif	Peraturan Gubernur		Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 - Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor
NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
5.	9 Tahun 2011	Irigasi	18 (1)	1. Komisi Irigasi Provinsi	Keputusan Gubernur	6 Bulan	
			23 (2)	2. Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Petani Pemakai Air	Peraturan Gubernur		
			25 (2)	3. Pengakuan Hak Ulayat Dalam Pengelolaan Irigasi	Peraturan Gubernur		

			27 (3)	4. Izin pemakaian air untuk irigasi	Keputusan Gubernur		
			29	5. Tata Cara dan Mekanisme Untuk Memperoleh Hak Guna Air Untuk Irigasi	Peraturan Gubernur		
			32 (2)	6. Penyediaan Air Irigasi Untuk Penyusunan Rencana Tata Tanam	Keputusan Gubernur		
			41 (4)	7. Pengaturan Pemanfaatan Air Irigasi Untuk Perikanan	Peraturan Gubernur		
			46	8. Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan, Perubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi	Peraturan Gubernur		
				9. Tata Cara Pemberian Izin Membuang Atau Merendam Keramba Ikan dan Bahan Lainnya yang Merusak Province Pada Saluran Drainase/Pembuang dan Menyadap/Mengambil Air Dari Saluran dan Bangunan Irigasi	Ditetapkan Oleh Gubernur		

			62 (2)	10. Pengelolaan Aset Irigasi	Peraturan Gubernur		
			71 (3)	11. Dana Pengelolaan Irigasi yang Pengelolaaannya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur		
			76 (6)	12. Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur		
				13. Rancangan Rencana Tahunan Penyedia Air Irigasi (Peraturan Gubernur)			
				14. Rancangan Rencana Tahunan Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi (Peraturan Gubernur)			

NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
6.	10 Tahun 2011	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato	7 (2)	1. Tata Cara Kepesertaan	Peraturan Gubernur		
			8 (2)	2. Paket Pelayanan Kesehatan Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur		
			9(3)	3. Tata Cara dan Besaran Iuran	Peraturan Gubernur		
			14 (2)	4. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama	Peraturan Gubernur		
			18 (6)	5. Sistem Rujukan Berjenjang	Peraturan Gubernur		
			19 (6)	6. Perhitungan Besaran Iuran Kepesertaan Jamkes Sumbar SAKATO	Peraturan Gubernur		

			21 (1)	7. Tim Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO	Keputusan Gubernur		
			21 (4)	8. Tugas dan Fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi Jamkes Sumbar SAKATO	Keputusan Gubernur		
			23 (3)	9. Sanksi Administrasi	Peraturan Gubernur		
NO.	NOMOR/TAHUN PERDA	JUDUL PERDA	PERATURAN PELAKSANAAN			Jangka Waktu Penetapan	KETERANGAN
			Pasal	Tentang	Jenis Prohukda		
7.	12 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat	82	Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Masing-Masing Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur	-	

